

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi bukan sekadar metrik kepuasan politik, melainkan prasyarat fundamental bagi keberlanjutan tata kelola fiskal negara. Dalam sistem pemerintahan demokratis, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari kualitas teknokratis substansinya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami dan meyakini proses perumusannya. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan berbanding lurus dengan efektivitas implementasi kebijakan, masyarakat yang percaya cenderung lebih patuh dan partisipatif [1]. Sebaliknya, defisit kepercayaan yang sering kali dipicu oleh persepsi atas rendahnya kualitas institusi, inefisiensi, maupun asimetri keadilan berpotensi melahirkan resistensi sosial. Skeptisisme semacam ini pada akhirnya akan menghambat berbagai manuver program ekonomi pemerintah [2]. Oleh karena itu, stabilitas kepercayaan publik menjadi elemen strategis dalam menjaga keberlanjutan tata kelola fiskal Negara.

Urgensi untuk menjaga stabilitas kepercayaan ini semakin mendesak di tengah dinamika ekonomi global. Proyeksi *International Monetary Fund* (2025) yang mematok pertumbuhan global pada angka 3,3% diiringi oleh ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi, memaksa pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam mengomunikasikan instrumen fiskalnya [3][4]. Di Indonesia, tantangan ini terekam jelas melalui anomali data. *Laporan Edelman Trust Barometer* (2025) mencatat penurunan indeks kepercayaan Indonesia ke angka 73%, terkoreksi tiga poin dari tahun sebelumnya [5]. Paradoksnya, meskipun tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum menembus 75,3% [6], optimisme masyarakat terhadap realitas ekonomi justru terperosok di angka 32,4% [7]. Kesenjangan angka ini menyiratkan satu realitas penting: membangun kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi jauh lebih kompleks daripada sekadar memelihara kepuasan politik.

Secara teoretis, tata kelola yang baik menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai akar kepercayaan [8]. Di era digital, pola komunikasi ini bertransformasi secara massif. Pemerintah yang menyajikan informasi secara akurat dan konsisten sedang membangun fondasi legitimasi. Namun, era digital mengubah anatomi komunikasi tersebut secara radikal. *Digital governance* memang memungkinkan distribusi kebijakan melesat tanpa batas ruang dan waktu. Namun, ketersediaan kanal digital tidak memiliki korelasi otomatis dengan peningkatan kepercayaan. Transformasi informasi dari sekadar 'tersedia' menjadi 'dipercaya' membutuhkan katalis. Merujuk pada kajian Hutahaean dkk., kepercayaan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kemudahan akses, dan efektivitas interaksi [9]. Artinya, platform digital pemerintah tidak boleh lagi sekadar menjadi etalase kebijakan, melainkan harus bertransformasi menjadi ruang interaktif yang membentuk persepsi positif.

Urgensi ini semakin tajam jika kita melihat masifnya investasi negara dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pusat Data Nasional. Infrastruktur ini dibangun untuk mengawal transparansi, namun peningkatan kapasitas teknologi sering kali memicu 'paradoks digitalisasi' jika tidak diimbangi dengan literasi dan inklusi sosial [10]. Ketersediaan puluhan dasbor data fiskal di media sosial tidak serta-merta melahirkan kepercayaan jika publik kesulitan mencerna maknanya. Paparan informasi yang terlalu teknis, atau justru terlalu masif tanpa tata kelola *framing* yang baik, justru berisiko menjadi bumerang yang memicu sinisme publik [9].

Tahun 2025 menjadi batu ujian krusial bagi Kementerian Keuangan. Sebagai fase transisi pasca-pemilu 2024, arah kebijakan fiskal berada di bawah sorotan tajam. Kendati kementerian telah merilis berbagai infografis dan data *real-time*, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) justru anjlok dari 76,65 menjadi 66,43 dengan selisih penurunan sebesar 9,22 poin [11]. Penetrasi internet yang menembus 185 juta pengguna rupanya diikuti oleh polusi disinformasi dan fragmentasi narasi [12]. Efektivitas komunikasi digital Kementerian Keuangan kini dipertaruhkan pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana data fiskal tersebut dipersepsikan sebagai kebenaran yang kredibel oleh masyarakat?

Studi terdahulu telah membuktikan bahwa transparansi anggaran dan diseminasi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik ($R^2 = 75,3\%$) [10]. Di sisi lain, Wulandari dan Semertzidis serta Kurniawan dkk. juga menegaskan bahwa tingkat pemahaman dan *perceived policy effectiveness* adalah nyawa dari dukungan publik atas kebijakan perpajakan [13][14]. Meskipun demikian, mayoritas diskursus akademik masih memosisikan 'persepsi masyarakat' sekadar sebagai variabel figuran. Padahal, persepsi inilah yang bertindak sebagai jembatan psikologis (*conversion factor*) elemen krusial yang menerjemahkan data mentah dari pemerintah menjadi dukungan nyata dari publik [9]. Celah literatur inilah yang sering kali gagal menjelaskan mengapa pemerintah yang sudah transparan tetap kesulitan meraih kepercayaan warganya.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada temuan kritis Hutahaeen dkk. bahwa meskipun transparansi telah menjadi fondasi kepercayaan publik di Indonesia, masih terdapat celah pada aspek akuntabilitas dan responsivitas pemerintah yang seringkali diabaikan dalam studi komunikasi digital serta belum dirasakan secara signifikan pengaruhnya oleh masyarakat [9]. Lemahnya pengaruh akuntabilitas dan responsivitas dalam penelitian penelitian tersebut diduga terjadi karena adanya hambatan dalam cara informasi tersebut dikomunikasikan kepada publik. Oleh karena itu, penelitian ini memperkenalkan variabel komunikasi digital sebagai elemen strategis yang diharapkan mampu mengoptimalkan penyampaian aspek akuntabilitas dan responsivitas pemerintah, sehingga pesan mengenai kinerja fiskal dapat diterima secara tepat dan meningkatkan kepercayaan secara signifikan [9].

Berdasarkan fenomena empiris, kesenjangan literatur, serta pentingnya *trust* dalam mendukung legitimasi kebijakan fiskal dapat dipahami bahwa penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh transparansi informasi dan komunikasi digital secara linier, tetapi secara spesifik menempatkan persepsi masyarakat sebagai variabel mediasi. Melalui pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), studi ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang komprehensif mengenai bagaimana komunikasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada masa transisi ini, dapat dikelola

untuk mengonversi keterbukaan informasi menjadi kepercayaan publik yang kokoh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kepercayaan Publik atas kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan RI ?
2. Bagaimana pengaruh Komunikasi Digital terhadap Kepercayaan Publik atas kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan RI ?
3. Bagaimana peran Persepsi Masyarakat dalam memediasi pengaruh Transparansi Informasi dan Komunikasi Digital terhadap Kepercayaan Publik atas kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan Republik Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kepercayaan Publik atas kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Komunikasi Digital terhadap Kepercayaan Publik atas kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Menganalisis peran Persepsi Masyarakat dalam memediasi pengaruh Transparansi Informasi dan Komunikasi Digital terhadap Kepercayaan Publik atas kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

1.4. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dimaksud untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian lebih terarah. Batasan masalah ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Indonesia usia produktif yang aktif menggunakan media digital serta pernah mengakses atau mengikuti pemberitaan terkait kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2. Objek penelitian dibatasi pada kebijakan ekonomi fiskal yang dikomunikasikan kepada publik melalui kanal digital resmi, tanpa menilai aspek teknis penyusunan kebijakan maupun dampak makroekonomi secara langsung.
3. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Transparansi Informasi dan Komunikasi Digital sebagai variabel independen, Persepsi Masyarakat sebagai variabel mediasi, serta kepercayaan publik sebagai variabel dependen.
4. Penelitian ini tidak secara khusus menguji variabel eksternal lain seperti kondisi politik, preferensi ideologis masyarakat serta kondisi ekonomi riil meskipun factor-factor tersebut secara konseptual dapat berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dideskripsikan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai transparansi informasi, komunikasi digital, persepsi masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya melalui penerapan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) yang divalidasi menggunakan Python dalam menganalisis hubungan antarvariabel penelitian.
3. Memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mengevaluasi dan mengembangkan strategi transparansi informasi serta komunikasi digital yang lebih efektif untuk meningkatkan persepsi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi.